



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PERTEMUAN WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA  
DENGAN  
KONSTITUEN PROVINSI PAPUA**

---

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Pertemuan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Waktu : 15.00 WIT s.d Selesai  
Tempat : Hotel Horison Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua  
Acara : Gus Muhaimin Mendegar Konstituen Provinsi Papua  
Ketua : Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra  
Sekretaris Rapat : Susantomo S.I.P M.AP.  
Hadir : **1. Pimpinan**  
- Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI  
**2. Narasumber**  
- Bambang Supriyadi  
- Fajar Asmara  
**3. Peserta Offline**  
- Apolos S (Rektor Universitas Cendrawasih)  
- Giri Wijantor (Tokoh Adat Papua)  
- Andi Firman Madjadi  
- Herdi Owu  
- Dr. KH. Toni Wanggai  
- Balo Wando  
- Pdt. Dominggus Pigai  
**4. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra**  
**5. Staff**

## I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
3. Bahwa Anggota Dewan adalah pejabat *elected* sebagai pemegang amanah suara rakyat, wajib melakukan agregasi dan artikulasi terhadap kehendak dan aspirasi rakyat.
4. Bahwa Anggota DPR RI wajib memperjuangkan program pembangunan untuk daerah pemilihan.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Masyarakat Provinsi Papua dilakukan secara Hybrid (Virtual dan offline) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Papua terutama yang terkait Isu sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang disampaikan saat melakukan dialog dengan tokoh akademisi, tokoh adat, agama serta masyarakat.

### ***Tanggapan Masyarakat***

Salah satu tokoh Papua, Apolos S ( rektor univ cendrawasih) menyampaikan rasa terima kasihnya. Karena itu, dirinya akan selalu berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat papua. Tokoh dan masyarakat Papua juga menyampaikan terima kasih karena DPR RI telah memperjuangkan UU Otsus.

Sementara itu, tokoh Papua, Giri wijiantor, menyampaikan bahwa saat ini di wilayahnya masih terkendala infrastruktur dasar pembangunan. "Pendidikan, kesehatan dan pertanian masih sangat terkendala. Pembangunan infrastruktur jalan dari ibu kota kabupaten ke ibukota kecamatan belum terakses. Dari distrik ke kampung-kampung juga belum terakses. Banyak anak disekolahkan di kota karena tidak ada layanan pembangunan pendidikan di kampung," katanya.

### **Tanggapan A. Muhaimin Iskandar**

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra siap memperjuangkannya di DPR bagi kesejahteraan Papua. Secara bersama-sama, seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan di DPR. Saya akan terus berjuang bagi kesejahteraan Papua. Hati saya selalu bersama sama masyarakat Papua.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengatakan, harapan baru untuk Papua saat ini lebih baik dan semakin nyata dengan adanya Undang-Undang Otsus Nomor 2 tahun 2021, perubahan kedua dari UU sebelumnya Nomor 21 Tahun 2001. Beberapa capaian luar biasa dari perjuangan UU Otsus yang baru ini, di antaranya pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk Papua yang dulu hanya 2%, kini meningkat menjadi 2,25 %.

Kedua, anggota DPRD jalur pengangkatan yang dulu hanya berlaku di DPRD Provinsi, kini telah mengakomodir jalur pengangkatan anggota DPRD di kabupaten/kota se-Papua Barat, sesuai mekanisme dan peraturan yang akan disusun kemudian.

Terobosan kebijakan ini merupakan solusi terbaik, kebijakan yang kompromistis, dari ditiadakannya partai politik lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan putra-putri terbaik Papua dapat memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan Papua sekaligus untuk Indonesia tercinta.

Ketiga, UU Otsus dulu hanya melahirkan 1 Peraturan Pemerintah, yakni adanya lembaga kultur orang asli Papua Majelis Rakyat Papua. Kini, akan ada 7 buah produk Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dalam bentuk rancangan.

Disisi lain, dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa provinsi di bumi cendrawasih ini selalu dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Hal ini sangat membanggakan dan layak kita terus pertahankan. Toleransi antar sesama anak-anak bangsa merupakan modal sosial yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan.

Meneladani spirit perjuangan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh yang mampu mendengar rakyat Papua. Keteladanan beliau sudah banyak kita baca, kita dengar, dan akan kita wariskan kepada bangsa Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra ini mengatakan, ada dua hal mendasar dan fundamental untuk membangun Papua dan Papua barat di masa depan. Pertama, pembangunan harus berpijak dan berlandas pada jalan kebudayaan/pendekatan budaya. Nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat, serta aturan-aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua.

Jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki, tidak terasing di tanah kelahirannya.

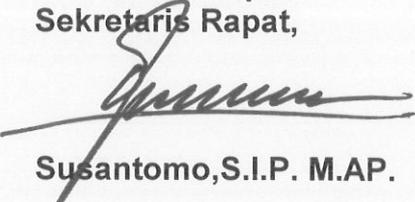
Kedua, masa depan Papua hanya bisa diwujudkan dengan melakukan transformasi dari pembangunan yang bersifat eksklusif ke inklusif. Pendekatan eksklusif pada masa lalu di bumi Papua telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau eksklusi sosial masyarakat Papua sendiri.

Pembangunan inklusif di Papua adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan distribusi infrastruktur sosial.

### III. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 16.15 WIT

A.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,



Susantomo, S.I.P. M.AP.